



RENJA TAHUN 2021

**Dinas pemberdayaan perempuan
Dan perlindungan anak
Kabupaten Bone**

Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi-Selatan telah dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran OPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja tahun 2021 ini diucapkan terima kasih.

Watampone, 14 Juli 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bone.



Dra. Hj. ST. ROSNAWATI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

Nip: 19641231 198512 2 030

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI CAPAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kerja Perangkat Daerah.....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	39
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	49
4.1 Gambaran Umum Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone	49
4.2. Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2021.....	50
BAB V STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	58
4.1. Kaidah Pelaksanaan.....	58
4.2. Penutup.....	58

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2021, adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk 1 (satu) tahun dimana memuat arah kebijakan sebagai rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2022 ini, merujuk pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312).

Selanjutnya Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2018- 2023 yang ditetapkan oleh

Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, dalam penyusunan Renja ini juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone, . Perencanaan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone pada tahun 2020 akan disajikan dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2021 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Informasi secara berjenjang dan mandiri Penggolongan/Pengkelompokan Pemberian Kode, dan Daftar Penamaan Menuju Single Codebase untuk digunakan penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Lainnya;
 18. Peraturan Menteri keuangan Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Informasi secara berjenjang dan mandiri Penggolongan/Pengkelompokan Pemberian Kode, dan Daftar Penamaan Menuju Single Codebase untuk digunakan penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Lainnya
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab/Kota Pasal 109);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas Di Kabupaten Bone;

30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
31. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023 (lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95).
34. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
35. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2022, disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone Tahun 2022. Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Renja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategi & kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Adapun Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone, adalah sebagai berikut :

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

**Mewujudkan Relasi Gender Menuju Kesetaraan
Dan Keadilan Gender**

Dengan Misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pengelolaan administrasi perkantoran dalam menyelesaikan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Meningkatkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam memperkuat relasi Gender.
4. Mewujudkan ketersediaan data pilah gender sebagai basis dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
5. Mendorong capaian IPG dan IDG yang setara dengan capaian IPM

Visi dan Misi tersebut di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bone Periode Tahun 2013-2025. Hal ini merupakan bentuk sinkronisasi dokumen perencanaan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Bupati Bone terpilih sebagaimana akan ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, yaitu :

“ Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera ”

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2022 sebagai bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut;

1. Menjadi acuan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran (RKA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone pada Tahun 2021,
2. Menetapkan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone sebagai acuan pengukuran realisasi capaian kinerja pada tahun 2021,
3. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan prioritas serta Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone dengan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Bone yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab.I. Pendahuluan Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2020.

Bab.II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Pada Bab ini Menyajikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah sudah disahkan, dan selanjutnya membahas Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008.

Bab.III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan berisikan :

- a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab. IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat rumusan tentang Tujuan dan Sasaran beserta Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 disertai dengan penyajian dana indikatif beserta sumbernya dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Bab V. Penutup Menyajikan Kesimpulan dan Harapan atas Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone pada Tahun 2021.

BAB. II

HASIL EVALUASI CAPAIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2022 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2019), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2018 Perangkat Daerah dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun 2019.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja hingga tahun 2018, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, dengan mempertimbangkan realisasi capaian program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone hingga tahun 2010 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2019 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2019, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPPPA Kabupaten Bone s/d Tahun 20219 (Triwulan 1)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019				
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1	Urusan Wajib												
1	11	Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak											
1	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Setiap Tahun Anggaran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	37,97%	37,97 %		
1	11	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Koneksi Internet (Wifi) Yang Terbayar	1 Rekening (Per Tahun)	-	1 Rekening	1 Rekening	100 %	1 Rekening	1 Rekening	25 %
1	11	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Pendukung Yang Mendapatkan Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Dan Asuransi	7 Orang (Per Tahun)	-	23 Orang	23 Orang	100 %	7 Orang	7 Orang	25 %
1	11	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Yang Menyediakan Bahan Bacaan	10 Media (Per Tahun)	-	10 Media	10 Media	100 %	10 Media	3 Paket	25,00 %
1	11	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Rakor Dan Konsultasi Yang Diikuti	50 Kegiatan (Per Tahun)	-	47 Kegiatan	47 Kegiatan	100 %	47 Kegiatan	17 Kegiatan	36,17 %
1	11	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	7 Paket (Per Tahun)	-	7 Paket	7 Paket	100 %	7 Paket	7 Paket	25,00 %
1	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sesuai Rencana Kebutuhan Setiap Tahun Anggaran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	4,00 %	4,00 %	
1	11	02	03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terbangun	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1	11	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan penganggaran : - Mobil - Sepeda Motor	(3 Unit) - 2 Unit mobil - 1 Unit motor	-	(2 Unit) - 2 Unit Mobil - 0 Unit Motor	(2 Unit) - 2 Unit mobil - 0 Unit motor	100 %	3 Unit	(3 Unit) - 2 Unit mobil - 1 Unit motor	40 %
1	11	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran : - TV - Sound System Ruangan - Mic Wireless - AC - Gorden - White Board - Papan Nama Kantor - Papan Hibauan & Informasi - Dispenser	(17 Unit/Set/Paket) - 1 Unit - 1 Set - 2 Set - 5 Unit - 1 Paket - 2 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 3 Unit	-	(1 Unit) - 0 Unit - 0 Set - 0 Set - 1 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(1 Unit) - 0 Unit - 0 Set - 0 Set - 1 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	100 %	(0 Set/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(0 Unit/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit	0,00 %
1	11	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran : - Komputer (PC Desktop) - Notebook/Laptop - Printer - Proyektor - Kamera - Monitor/Display - CCTV (3 Titik) - UPS/Stabilizer - Alat Penghancur Kertas	(28 Unit/Paket) - 7 Unit - 3 Unit - 7 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 2 Unit - 1 Paket - 5 Unit - 1 Unit	-	(8 Unit) - 3 Unit - 1 Unit - 2 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit	(8 Unit) - 3 Unit - 1 Unit - 2 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit	100 %	(0 Unit) - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit	(0 Unit) - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit	0,00 %

					- Alat Potong Kertas - Meter Dorong - Tabung pemadam - Check Lock/ Mesin Absensi Pegawai	- 1 Unit - 1 Unit - 1 unit - 3 unit		- 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 1 Unit	- 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 1 Unit	- 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	- 0 Unit - 0 unit - 0 Unit - 0 Unit		
1	11	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan penganggaran : - Meja Kerja - Meja Rapat - Kursi Kerja - Kursi Rapat - Kursi Tunggu - Sofa - Lemari Arsip - Rak Buku	(120 Buah/Set) - 20 Buah - 4 Buah - 20 Buah - 50 Buah - 24 Buah - 5 Buah - 6 Buah - 5 Buah	-	(17 Buah) - 5 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 12 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	(17 Buah) - 5 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 12 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	100 %	(0 Buah) - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	(0 Buah) - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	0,00 %
1	11	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 Unit (Per Tahun)	-	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	20,00 %
1	11	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Tahunan (STNK) Secara Rutin Setiap Tahun	6 Unit (Per Tahun)	-	2 Unit	2 Unit	100 %	3 Unit	3Unit	11,76 %
1	11	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Secara Rutin Sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran	6 Unit (Per Tahun)	-	4 Unit	4 Unit	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %
1	11	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatagedung Kantor Yang Dipelihara Secara Rutin Sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran	20 Unit (Per Tahun)	-	12 Unit	12 Unit	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %
1	11	02	28	Pemeliharaan rutin berkala meubeleur	Jumlah Jenis Meubeleur Gedung Kantor Yang Dipelihara Secara Rutin Sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran	3 Jenis (Per Tahun)	-	3 Jenis	3 Jenis	100 %	3 Jenis	0 Jenis	0,00 %
1	11	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur Sesuai Rencana Kebutuhan Setiap Tahun Anggaran	100 %	-	-	-	-	100 %	0,00 %	0,00 %
1	11	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Asn	25 Pasang	-	-	-	-	-	-	0,00 %
1	11	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	-	70 %	-	0%	75 %	0.00 %	0,00%
1	11	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal	20 orang							
1	11	05	...	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis	20 orang							
1	11	06		Program Peningkatan Sistem laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	42,86 %	42,86 %
1	11	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersusun	4 Jenis Dokumen (Per Tahun)	-	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	100 %	4 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	50,00 %
1	11	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Yang Tersusun	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Yang Tersusun	7 Jenis Dokumen (Per Tahun)	-	7 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	100 %	7 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	33,33 %
1	11	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum Setiap Tahun Anggaran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	14,29 %	14,29 %
1	11	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Dan Anggaran Yang Tersusun Selama Satu Tahun Anggaran	7 Jenis Dokumen (Per Tahun)	-	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	100 %	4 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	50,00 %
1	11	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dikelola dalam satu tahun anggaran	1 Website (Per Tahun)	-	-	-	-	1 Website	1 Website	100 %

1	11	08	03	Promosi dan pameran pembangunan	Jumlah pameran dan promosi pembangunan yang diikuti	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	0.00 %	
1	11	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase ketersediaan kebijakan /regulasi daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		57,70 %	-	2,98	2,98	100 %	2,98	2,98	100 %
1	11	15	01	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	15	02	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Dibidang Politik Dan Jabatan Publik.	3 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	15	03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Inklusif Dilevel Kab, Kec, Desa Dan Kelurahan	100 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	15	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Hasil Evaluasi Dan Monitoring Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4 Laporan Triwulan (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	15	05	Perumusan kebijakan tentang perkindungan perempuan	Jumlah Regulasi Daerah Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Yang Ditetapkan	4 Laporan Triwulan (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	16		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak	Persentase kelembagaan PUG aktif ditingkat Kab, kecamatan, desa dan kelurahan		96,20	-	11,55 %	11,55 %	100 %	24,66	25,15 %	100 %
					Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak		89,74 %	-	38,46	38,46	100 %	51,28	25,15 %	100 %
1	11	16	01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Advokasi Dan Fasilitasi PUG	30 orang (Per Tahun)	-	30 Orang	30 Orang	100 %	35 Orang	25,15 %	100 %	
1	11	16	02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi, Mekanisme Penanganan Dan Pencegahan KDRT Secara Terpadu	35 Orang/Kec (Per Tahun)	-	490 orang	490 Orang	100 %				86 %
1	11	16	03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Peserta Pelatihan Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Di Kecamatan Dalam Pengentasan Kemiskinan	30 Orang /Kecamatan/Desa (Per Tahun)	-	150 orang	150 orang	100 %	-	-	-	-
1	11	16	04	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan Gender (KKG)	Jumlah Media KIE Gender Dan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Yang Tersedia.	15 Buah (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	16	05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	50 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	50 Orang	-	-	0 %
1	11	16	06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Peserta Pelatihan PPRG Bagi Perencana PD Tkt. Kab, Kecamatan , Desa Dan Kelurahan	50 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	16	07	Evaluasi pelaksanaan PUG dan perlindungan Anak	Jumlah Hasil Verifikasi Data PUG Dan Perlindungan Anak Tkt Kabupaten Dan Kecamatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	25 %
1	11	16	08	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Jumlah Peserta Terlatih Pengelola Sistem Informasi Dan Data Analisis Gender Dan Anak	50 orang (Per Tahun)	-	-	-	-	40 orang	40 orang	-	100 %
1	11	16	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Aparat perencana kecamatan, Desa/ kelurahan yang telah melaksanakan PUG yang aktif	399 orang (Per Tahun)	-	399 orang	399 orang	100 %	-	-	-	-
1	11	16	10	Fasilitasi pembentukan gugus tugas penanggulangan trafficking	Jumlah gugus tugas penanggulangan trafficking, bencana alam, konflik sosial dan buruh migran yang terbentuk.	5 Gugus Tugas	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	16	11	Pelatihan untuk penyebarluasan PUG dalam bidang pembangunan penyusunan PPRG	Jumlah Aparat perencana Kab, Kec, Desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan TOF PPRG	436 Orang (Per Tahun)	-	37 PD	37 PD	100 %	130 orang	30 orang	-	25 %

1	11	16	12	Penyusunan dan evaluasi standar operasional pelayanan SOP	Jumlah SOP yang tersusun	1 (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	16	13	Pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilaksanakan	80 Orang (Per tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	16	14	Peningkatan kapasitas peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, mekanisme posisi perempuan dibidang jabatan publik di Kecamatan, Desa dan Kelurahan	50 Orang (Per Tahun)	-	200 orang	200 orang	100 %	200 orang	-	0%	-	
1	11	16	15	Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta sosialisasi P2TP2A tingkat Kab, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.	35 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	455 orang	-	0%	-	
1	11	16	16	Pencegahan pidana perdagangan anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak	50 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	16	17	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	16	18	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Pokja Dan Fokalpoint PD Dalam Pelembagaan PUG	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	16	19	Penguatan pokja PUG dan fokalpoint pengarusutamaan gender	Jumlah PD Yang Memiliki Fokal Point PUG	39	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase Forum Anak Yang Terbentuk	50,25 %	-	5 %	5 %	100 %	6 %	100 %	100 %	100 %	
1	11	17	01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan didaerah	Jumlah Regulasi Terkait Kebijakan Perlindungan Perempuan Yang Ditetapkan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah Peserta Yang Mengikuti TOT SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	03	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah SOP Tentang Layanan Penanganan Pengaduan Secara Terpadu Yang Tersusun	2 SOP (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	04	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan atau (PBAP)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Dan Putus Sekolah	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	05	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah Peserta Advokasi Dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah Peserta Sosialisasi Sitem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT Korban Kekerasan	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	07	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat	Jumlah Buku Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat Yang Tersusun	1 Buku (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	08	Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	09	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monev Yang Dilaksanakan	1 Kali (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	10	Revitalisasi panduan pembinaan gerakan sayang ibu (GSI)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan GSI Ditingkat Kecamatan, Desa Dan Kelurahan	399 Orang (Per Tahun)	-	108	108	100 %	399 orang	-	25 %	-	
1	11	17	11	Penyusunan profil statistik dan analisis gender	Jumlah Profil Statistik Dan Analisis Gender Yang Tersusun	2 Buku (Per Tahun)	-	-	-	-	2	-	25 %	-	
1	11	17	12	Pengembangan restorative justice anak yang berhdapan dengan hukum	Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Restorative Justice Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	30 Orang/ Kec (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	11	17	13	Pembentukan forum anak	Jumlah Forum Anak Yang Terbentuk Dan Jumlah Anak Yang Mengikuti Pembentukan Forum Anak Di Kabupaten, Kecamatan Desa Dan Kelurahan.	27 Forum/ 54 orang (Per Tahun)	-	1 Forum// 108 orang	1 Forum// 108 orang	100 %	4 forum/ 216 orang	4 forum/ 216 orang	-	25 %	-

1	11	17	14	Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak- hak dasar anak	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Hak- Hak Dasar Anak Di Kab, Kec, Desa Dan Kelurahan	150 Orang	-	750 orang	750 orang	100 %	290 orang	290 orang	25 %
1	11	17	15	Evaluasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Yang Layak Anak	10 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
1	11	17	16	Evaluasi kabupaten layak anak	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor 800 (Per tahun)	-	-	-	-	-	-	-
1	11	17	17	Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-
1	11	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan	66,66 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %
1	11	18	01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Di Kec, Desa Dan Kelurahan	50 Orang/Kec. (Per Tahun)	-	300 orang	300 orang	100 %	450 orang	450 orang	0 %
1	11	18	02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	100 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-
1	11	18	03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-
1	11	18	04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Rumah Tangga	30 Orang (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-
1	11	18	05	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan	Jumlah Pameran Hasil Karya Perempuan Dibidang Pembangunan Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan (Per Tahun)	-	-	-	-	-	-	-
1	11	18	06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monev Di Kec/Desa Dan Kelurahan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1	11	18	07	Peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Kecamatan/Desa Yang Menjadi Lokasi Pembinaan Peningkatan Peranan Keluarga Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera	1 (Kec,Desa) (Per Tahun)	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100 %	1 Desa	1 Desa	0 %	
1	11	18	08	Pembentukan operasionalisasi dan penguatan kelembagaan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) YANG Terbentuk	1 Puspaga (Per Tahun)							
1	11	18	09	Peningkatan peranan keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan (P2K3)	Terselenggaranya Pembinaan Pada Lokasi P2K3	1 (Kec,Desa) (Per Tahun)							

Keterangan : PD = Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2019 (Triwulan 1) - DPPPA Kab. Bone

LIS BELANJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019 (Triwulan 1)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 1.850.000.000,-	Rp. 1.837.310.879.24	95,50 %	Rp. 1.700.000.000,-	Rp. 424.844.150,-	24,49 %
- Belanja Pegawai	Rp. 130.985.000,-	Rp. 130.985.000,-	97,85 %	Rp. -	-	-
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 1.581.515.000,-	Rp. 1.569.350.879	90,93 %	Rp. 1.700.000.000,-	Rp. 424.844.150,-	24,99 %
- Belanja Modal	Rp. 137.500.000,-	Rp.136.975.000,-	98,72 %	Rp. -	Rp-	



Berdasarkan realisasi capaian hasil (outcome) program dan keluaran (output) kegiatan yang tersaji pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa dari 8 indikator outcome dan 18 indikator output pada 8 program dan 34 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone pada Tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat 8 Indikator Outcome dari 8 Program dan 18 kegiatan Indikator Output dari 34 Sub Kegiatan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dengan nilai realisasi capaian kinerja sekitar 95-100% (dapat dilihat secara lengkap pada tabel 1), dan diproyeksikan akan mendorong tercapainya target kinerja program pada tahun 2021 sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Periode Tahun 2018 s.d 2023.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target kinerja outcome dan output dari program/kegiatan tersebut di atas, antara lain :

- Komitmen dan kerja sama dari seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan;
 - Perencanaan kinerja dari program dan kegiatan tersebut yang telah mempertimbangkan faktor resiko khususnya terkait dengan ketersediaan SDM dan anggaran yang ada, meskipun belum memadai jika dibandingkan dengan luasnya wilayah dan beban kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atas penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Bone.
- b. Terhadap target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, secara umum diproyeksikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, jika pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 yang sementara berjalan dapat dioptimalkan.
 - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renja dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone), khususnya program/kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, antara lain sebagai berikut :
 - > Perencanaan program dan kegiatan dengan indikator outcome dan output serta target yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - > Penganggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan perlu diupayakan peningkatannya dengan prinsip "*money follow program*", yang tentunya harus didahului dengan perencanaan kerja program dan kegiatan yang benar-benar

diarahkan pada terwujudnya dampak/outcome/output yang menjadi indikator kunci pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone mempunyai tugas dan fungsi dalam hal Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 107 Tahun 2017, Perda Kab. Bone Nomor 08 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk lima tahun kedepan mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2018-2023, dimana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone dinyatakan dalam 2 (Dua) sasaran strategis dan 7 (Tujuh) indikator sasaran.

Ketujuh indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel. 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018- 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	N	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
-------------------------	---	-----------------------	-------------

Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG)	Persentase Keterlibatan Perempuan Di DPRD	%	$\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di DPRD}} \times 100\%$	DPPPA
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks		BPS
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks		BPS
Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	$\dots \times 100\%$	DPPPA
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Tertangani Sesuai Standar	%	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan}} \times 100\%$	DPPPA
	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Standar	%	$\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan}} \times 100\%$	DPPPA
	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Skor	Skor Anak	DPPPA

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone hingga Tahun 2020 (Triwulan 1) untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2018 s.d 2023, disajikan dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPPP Kab. Bone hingga Tahun 2020 (Triwulan 1) dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 1 : Meningkatnya indeks pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)											
01	Persentase Keterlibatan Perempuan di DPRD	-	-	17,01 %	18,00 %	17,01 %	18,00 %	17,32 %	18,30 %	17,20 %	18,20 %
<p>Catatan Analisis : Hingga Tahun 2022, berdasarkan hasil pemilutanggal 17 April 2021 telah dilaksanakan dimana anggota legislatif perempuan yang terpilih sebanyak 4 (empat) orang , dibandingkan pemilu lima tahun lalu ada penurunan secara signifikan persentase keterlibatan perempuan di DPRD yang terpilih sebanyak 6 orang dibandingkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah 30 % kuota untuk perempuan, artinya masih banyak yang perlu dibenahi dan dilakukan guna memberikan peluang dan penyadaran kepada perempuan guna keterwakilan suara perempuan di DPRD Kabupaten Bone kedepan agar lebih optimal lagi.</p>											
02	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	-	91,90 %	91,90 %	91,94 %	91,97 %	91,60 %	92,00 %	90,25%	92,40%
<p>Catatan Analisis : Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone untuk indikator sasaran ini belum dapat diukur tingkat capaiannya dikarenakan data rilis BPS belum dikeluarkan sampai saat ini, tetapi dari segi optimalisasi kegiatan untuk mendukung indikator kinerja ini telah dilaksanakan guna mendorong capaian dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan renstra Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten bone. Kedepannya, diperlukan komitmen dan koordinasi yang lebih optimal dalam pemutakhiran datanya sebagai bagian dari Program Tahunan DPPP Kab. Bone.</p>											
03	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	62,40 %	62,51 %	62,40 %	62,51 %	62,00%	62,30 %	78.30 %	79,15 %
<p>Catatan Analisis : Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone untuk indikator sasaran ini belum dapat diukur tingkat capaiannya dikarenakan data rilis BPS belum dikeluarkan sampai saat ini, tetapi dari segi optimalisasi kegiatan untuk mendukung indikator kinerja ini telah dilaksanakan guna mendorong capaian dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan renstra Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten bone. Kedepannya, diperlukan komitmen dan koordinasi yang lebih optimal dalam pemutakhiran datanya sebagai bagian dari Program Tahunan DPPP Kab. Bone.</p>											
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak											
04	Rasio KDRT	-	-	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,07 %	0,05 %	0,04 %	0,04 %
<p>Catatan Analisis : Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone untuk indikator dan sasaran ini, sudah baik dimana dapat kita lihat hasil dan target capaian dimana antara target yang ditetapkan masih lebih tinggi dibandingkan hasil capaian, artinya diantara sribu perempuan dikabupaten bone ada 7 orang yang mengalami kasus KDRT artinya masih diperlukan upaya agar kekerasan dalam rumah tangga ini tidak terjadi atau melampaui target yang telah ditetapkan sebagai bahan kinerja program dan kegiatan untuk menurunkan kasus- kasus KDRT.</p>											
05	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
<p>Catatan Analisis : Realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja ini, telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2018, dimana telah semua korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor ke UPT P2TP2A telah ditangani sesuai Prosedur yang berlaku, tingkat capaian kinerja ini telah memenuhi target yang direncanakan hingga akhir tahun 2018 nanti. Untuk Tahun 2019(hingga bulan Maret) sementara menunggu kasus atau korban yang melapor pada UPT P2TP2A.</p>											

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2022	TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
<p>Catatan Analisis : Capaian kinerja Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab. Bone untuk indikator ini, hasilnya sangat baik dimana dengan terbentuknya UPT P2TP2A semua kasus yang dilaporkan berdasarkan data yang ada telah diproses dan diselesaikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dan bekerjasama dengan mitra kerja terkait seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Bapas kabupaten Bone.</p>											
07	Tingkat capaian kabupaten layak anak	-	-	600	600	700	700	700	800	900	900
<p>Catatan Analisis : Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone untuk indikator sasaran ini juga telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dan renja dimana kabupaten bone meraih penghargaan tertinggi sebagai salah satu kabupaten layak anak kategori pratama dengan skor 650 , dan di tahun 2019 bisa ditingkatkan lagi menjadi kategori nindya atau madya dengan skor 800-900.</p>											

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone nomor 6); selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera.
- b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Perlindungan dan Keluarga Sejahteraan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Perlindungan dan Keluarga Sejahteraan;
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam menjalankan tugasnya antara lain :

- a. Kualitas dan kuantitas SDM belum optimal
- b. Jumlah anggaran tidak signifikan terhadap kewenangan yang dibebankan sehingga beberapa program dan kegiatan upaya masih belum dapat dilaksanakan.
- c. Masih kurang optimalnya koordinasi DP3A dengan stakeholder
- d. Masih belum optimalnya kualitas aparatur dalam tugas dan fungsinya
- e. Masih belum optimalnya pengintegrasian PPRG dan PUG dalam proses pembangunan daerah
- f. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak dalam pemanfaatan pembangunan

- g. Belum tersedianya data pilah Gender sebagai basis dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender
- h. Masih belum optimalnya capaian IPG dan IDG yang setara dengan capaian IPM

Strategi dan kebijakan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

a. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
6. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
7. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
8. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan ketahanan dan kualitas keluarga.
9. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya ketahanan dan kualitas keluarga.
10. Memperkuat lembaga/jejaring PUSPAGA untuk meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.
11. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.

12. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
13. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
14. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
15. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
16. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
17. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
18. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
19. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten layak anak.
20. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
21. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
22. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
23. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
24. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
25. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.

26. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender.
27. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
28. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya untuk penyediaan data pilah gender dan anak.
29. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan dinas.
30. Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dinas.
31. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan.

b. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
4. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga dengan fokus pada penguatan lembaga PUSPAGA.
5. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
9. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
10. Penguatan penyediaan dan pemutakhiran data pilah gender dengan fokus pada pengembangan sistem informasi gender dan anak.
11. Peningkatan koordinasi penyediaan dan pemanfaatan data dengan fokus pada penyusunan data gender dan anak.

12. Peningkatan pengelolaan administrasi pelayanan dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022, dapat dilihat bahwa program dan kegiatan yang diusulkan telah mengakomodir kebutuhan program kegiatan selama satu tahun khususnya di tahun 2022 dimana antara rancangan awal RKPD sama dengan hasil analisis kebutuhan sementara itu besaran PAGU yang telah ditetapkan tidak sebesar jumlah PAGU yang diharapkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sehingga nantinya akan berimbas kepada kegiatan yang diusulkan berupa pengurangan volume kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal Renja perangkat daerah dengan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian target Renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu- isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Hal – hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/ kegiatan, lokasi, indikator kinerja (Outcome/ Output) beserta targetnya, juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan – perbedaan yang ditemukan (tersebut diatas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bone Tahun 2021 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/ kegiatan, lokasi, indikator kinerja (Outcome/ output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDkab. Bone Tahun 2021– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Realisasi (%)	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Realisasi(%)	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	96,07%	94,50 %	3.388.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	97,07%	95,50%	3.388.000.000	Program Pendukung
1).	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang disusun selama satu tahun anggaran	95,50 %	95,50 %	21.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Realisasi Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang disusun selama satu tahun anggaran	8 Dokumen	95,50 %	21.000.000	Pendukung
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	5 Dokumen Perencanaan, Renstra Renja, RKA SKPD,DPA SKPD, DPPA SKPD	95,50%	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	5 Dokumen Perencanaan, Renstra Renja, RKA SKPD,DPA SKPD, DPPA SKPD	95,50 %	15.000.000	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	3 Dokumen LKJIP,SAKIP, LPPPD	95,50%	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Laporan LAKIP, LKJIP, LPPD yang tersusun	3 Dokumen LKJIP,SAKIP, LPPPD	95,50%	6.000.000	
2).	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,07 %	97,07%	1.830.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97,07 %	97,07%	1.830.000.000	Pendukung
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	228 Kali	100 %	1.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah ASN Dinas DPPA Kab. Bone	228 Kali	100 %	1.800.000.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan, Semesteran, CALK, LRA, Parsial, I,II,III	95,50%	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	4 Laporan Semesteran	95,50%	30.000.000	
3).	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,50 %	95,50 %	137.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,50 %	95,50 %	137.000.000	Pendukung
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	6 Orang	95,50%	97.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	6 Orang	95,50%	97.000.000	
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	95,50%	40.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	95,50%	40.000.000	
4).	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,05 %	95,05 %	1.542.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,05 %	95,05 %	1.542.000.000	Pendukung

7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	95,50%	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	95,50%	100.000.000	
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Makanan Miniman Rapat dan Tamu	4 Paket	95,50%	100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Makanan Miniman Rapat dan Tamu	4 Paket	95,50%	100.000.000	
9.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	2 Paket	95,50%	82.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	2 Paket	95,50%	82.000.000	
10.	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	95,50%	60.000.000	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	95,50%	60.000.000	
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah keikutsertaan Aparat dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	80 Paket	95,50%	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah keikutsertaan Aparat dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	80 Paket	95,50%	450.000.000	
5).	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	95,50 %	95,50%	133.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	95,50 %	95,50%	133.000.000	Pendukung
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Paket	95,50%	133.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Paket	95,50%	133.000.000	
6).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	95,50 %	95,50%	230.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	95,50 %	95,50%	230.000.000	Pendukung
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv)	12 Bulan	95,50%	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv)	12 Bulan	95,50%	20.000.000	
14.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	10 Orang	95,50%	210.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	10 Orang	95,50%	210.000.000	
15.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	95,50 %	95,50%	245.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	95,50 %	95,50%	245.000.000	Pendukung
15.	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	5 Unit	95,50%	180.000.000	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	5 Unit	95,50%	180.000.000	
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20 Unit	95,50%	45.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20 Unit	95,50%	45.000.000	

17.	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Gedung	95,50%	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Gedung	95,50%	20.000.000	
II.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kecamatan Desa dan Kelurahan	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat Perangkat Daerah	91,07 %	90,00 %	1.082.000.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kecamatan Desa dan Kelurahan	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat Perangkat Daerah	92,07 %	90,50 %	1.082.000.000	Program Kinerja Utama
8).	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. TRB.Tenete Riattang, Palakka, Lapri, Mare, Awangpone, Sibulue.	Jumlah Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab. Bone yang dilaksanakan	92,07 %	90,50 %	165.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. TRB.Tenete Riattang, Palakka, Lapri, Mare, Awangpone, Sibulue.	Jumlah Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab. Bone yang dilaksanakan	92,07 %	90,50 %	165.000.000	Program Kinerja Utama
18.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten,Kota	Kec. Amali, salomekko, Patimpeng, kahu, Cenrrana, Dua, Boccoe	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG yang dilaksanakan	1 Paket	90,50 %	60.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten,Kota	Kec. Amali, salomekko, Patimpeng, kahu, Cenrrana, Dua, Boccoe	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG yang dilaksanakan	1 Paket	90,50 %	60.000.000	
19	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30 Orang	90,50 %	105.000.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30 Orang	90,50 %	105.000.000	
9).	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	90,50%	90,50%	80.0000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Lapri, Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	90,50%	90,50%	80.0000.000	Program Kinerja Utama
20.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	90,50%	80.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	90,50%	80.000.000	
10).	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan	90,50%	90,50%	117.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan	90,50%	90,50%	117.000.000	Program Kinerja Utama
21.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat peningkatan kapasitas	500 Orang	90,50 %	67.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat peningkatan kapasitas	500 Orang	90,50%	67.000.000	
22	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Kec. Tanete Riattang Barat,Timur, Tanete Riattang ,	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan	3 Paket	90,50 %	50.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	K Kec. Tanete Riattang Barat,Timur, Tanete	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan	3 Paket	90,50%	50.000.000	

	Kewenangan Kabupaten/Kota	Palakka Ulaweng					Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Riattang, Palakka Ulaweng					
III	Program Perlindungan Perempuan	Kecamatan, Desa, Kelurahan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan termasuk TPPO pada unit pelayanan terpadu	84,00 %	100 %	311.500.000	Program Perlindungan Perempuan	Kecamatan, Desa, Kelurahan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan termasuk TPPO pada unit pelayanan terpadu	85,00 %	100 %	311.500.000	Program Kinerja Utama
11)	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten, Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Bone	85,50 %	100 %	175.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten, Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Bone	85,50 %	100 %	175.000.000	Program Kinerja Utama
23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bengo, Tellu Siattingge, Mare, Dua Boccoe, Awangpone	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Pemerintahan Kabupaten Bone	50 Orang	100 %	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bengo, Tellu Siattingge, Mare, Dua Boccoe, Awangpone	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Pemerintahan Kabupaten Bone	50 Orang	100 %	100.000.000	
12).	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi yang disediakan	85,50 %	100 %	70.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi yang disediakan	85,50 %	97,07%	70.000.000	Program Kinerja Utama
24.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan Layanan rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan	1 Paket	100 %	70.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan Layanan rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan	150	97,07%	70.000.000	
13).	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pattimpeng, Awangpone, Sibulue, Ulaweng	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kab. Bone yang mendapat penguatan dan pengembangan	85,50 %	100 %	66.500.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pattimpeng, Awangpone, Sibulue, Ulaweng	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kab. Bone yang mendapat penguatan dan pengembangan	85,50 %	100 %	66.500.000	Program Kinerja Utama
25.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Pattimpeng, Awangpone, Sibulue, Ulaweng	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat peningkatan kapasitas	50 Orang	100 %	66.500.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Pattimpeng, Awangpone, Sibulue, Ulaweng	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat peningkatan kapasitas	90	100 %	66.500.000	
IV.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kecamatan Desa, Kelurahan	Persentase perempuan kepala rumah tangga miskin yang mendapat pemberdayaan (%)	85,50	100 %	159.500.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kecamatan Desa, Kelurahan	Persentase perempuan kepala rumah tangga miskin yang mendapat pemberdayaan (%)	85,50	100 %	159.500.000	Program Kinerja Utama

14).	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya yang mendapat penguatan dan pengembangan	85,50 %	100 %	155.500.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya yang mendapat penguatan dan pengembangan	85,50 %	100 %	155.500.000	Program Kinerja Utama
26.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilaksanakan	1 Lokasi	100 %	70.500.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilaksanakan	1 Lokasi	100 %	70.500.000	
27.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas	30 Orang	100 %	35.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas	30 Orang	100 %	35.000.000	
28.	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Palakka	Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat penguatan/pembinaan	50 Orang	100 %	50.000.000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Palakka	Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat penguatan/pembinaan	50 Orang	100 %	50.000.000	
15).	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya yang dilaksanakan	85,50 %	100 %	40.000.0000	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya yang dilaksanakan	85,50 %	100 %	40.000.0000	Program Kinerja Utama
29.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kegiatan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya antara Lembaga dan Organisasi	30 Orang	100 %	40.000.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kegiatan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya antara Lembaga dan Organisasi	30 Orang	100 %	40.000.000	
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kecamatan	Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang tersedia (%)	87 %	100 %	100.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang tersedia (%)	87 %	100 %	100.000.000	Program Kinerja Utama
16).	Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disajikan	90 %	97,07%	100.000.000	Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disajikan	90 %	100 %	100.000.000	Program Kinerja Utama

30.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Data Gender dan Anak di yang disediakan	100 Buku	100 %	50.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Data Gender dan Anak di yang disediakan	100 Buku	100 %	50.000.000	
31.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat, Kec. Tanete Riattang	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data yang disajikan dan dimanfaatkan	50 Orang	100 %	50.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat, Kec. Tanete Riattang	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data yang disajikan dan dimanfaatkan	50 Orang	100 %	50.000.000	
VI.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kecamatan Kelurahan, Desa	Persentase kecamatan, desa dan kelurahan layak anak	90,02 %	97,07%	250.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kecamatan Kelurahan, Desa	Persentase kecamatan, desa dan kelurahan layak anak	90,02	97,07%	250.000.000	Program Kinerja Utama
32).	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	90,02 %	97,07%	250.000.000	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	90,02 %	97,07%	250.000.000	Program Kinerja Utama
32.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Kepada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	200 Orang	97,07%	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Kepada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	200 Orang	97,07%	150.000.000	
33.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Kelurahan, Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan	130 Orang	97,07%	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Kelurahan, Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan	130 Orang	97,07%	100.000.000	
VII.	Program Khusus Perlindungan Anak	Kecamatan, Kelurahan da Desa	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	85,50 %	100 %	140.000.000	Program Khusus Perlindungan Anak	Kecamatan, Kelurahan da Desa	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	85,50 %	100 %	140.000.000	Program Kinerja Utama
18).	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, Kelurahan da Desa	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	85,70 %	100 %	50.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, Kelurahan da Desa	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	85,70 %	100 %	100.000.000	Program Kinerja Utama
34.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Kelurahan da Desa	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	100 Kali	100 %	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan, Kelurahan da Desa	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	100 kali	100 %	100.000.000	
19).	Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi yang disediakan	85,70 %	100 %	40.000.000	Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi yang disediakan	85,70 %	100 %	83.000.000	Program Kinerja Utama

35.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan	50 Orang	100 %	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan	50 Orang	100 %	83.000.000		
20).	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan	85,70 %	100 %	50.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan	85,70 %	100 %	150.000.000	Program Kinerja Utama	
36.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan	100 Kali	100 %	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ecamatan, Kelurahan dan Desa	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan	100 Kali	100 %	150.000.000		
TOTAL PAGU INDIKATIF						5.431.000.000	TOTAL PAGU INDIKATIF						5.431.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini program / kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, maupun dari delegasi kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah, berdasarkan pengumpulan informasi perangkat daerah yang telah dilaksanakan dari Musrenbang Kecamatan, dari 27 kecamatan yang tergabung dalam ForumPerangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bone yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2019 hanya satu kecamatan yang mengusulkan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone perencanaan tahun 2022 yaitu kecamatan Mareyakni Desa Sumaling dan Desa Mattampawalie mengusulkan kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan pendidikan pelatihan peran serta gender dalam pembangunan pada Desa tersebut nantinya mendapatkan perhatian yang lebih baik, dan berdasarkan hasil pertemuan kebanyakan kecamatan. Desa/ kelurahan lebih dominan mengusulkan program / kegiatan yang sifatnya Infrastruktur Baik di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagai kebutuhan yang paling prioritas pada Musrenbang ini.

Namun demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, tetap mengamati isu- isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan dan isu- isu yang berkembang dalam masyarakat umumnya merupakan hal- hal yang dianggap penting yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dan adapun usulan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Bone Propinsi Sulswesi Selatan

No	Program/ kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Besaran / volume	catatan
----	----------------------	--------	-------------------	---------------------	---------

I.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kecamatan Mare	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas	8 Klp	Diterima
1.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Desa Sumaling	Jumlah peserta sosialisasi yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi perempuan di Kecamatan, desa dan kelurahan	2 Klp	Diterima
2.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Desa Mattampawalie	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	7 Klp	Diterima

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DERAH

3.1Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan

pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak sasarannya adalah :

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.2 Tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah

Tujuan merupakan sebuah penjabaran dari sebuah yang mengindikasikan kinerja yang akan dicapai pada sebuah periode perencanaan. Tujuan dan sasaran dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam jangka waktu lima tahun (2018-2023) adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
2. Meningkatkan Akuntabilitas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Sasaran jangka menengah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone pada tahun 2018-2023, yaitu:

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- b. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bone.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak salah satunya adalah pencapaian visi misi kepala daerah yang menyatakan cita- cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa visi merupakan pernyataan keinginan dari organisasi merupakan hal yang sangat krusial bagi organisasi untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.

Adapun penjabaran misi yang digunakan dalam melaksanakan pencapaian visi kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pengelola administrasi perkantoran dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 2. Meningkatkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan.
 3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam memperkuat relasi gender.
 4. Mewujudkan ketersediaan data pilah gender sebagai basis dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
 5. Mendorong capaian IPG dan IDG yang setara dengan capaian IPM.
- b. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 adalah :
1. Jumlah program sebanyak 7 (Tujuh) antara lain adalah
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
 - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
 - Program Perlindungan Perempuan.
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
 - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
 - Program Perlindungan Khusus Anak.

Jumlah kegiatan yang direncanakan sebanyak 18 (Delapan Belas) kegiatan 34 Sub Kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah program dan kegiatan yang sifatnya program wajib dimana penyebarannya hampir di 27 kecamatan yang tersebar di lokasi sesuai tertera dalam Tabel 6 dimana program dan kegiatan ini langsung menyentuh masyarakat khususnya perempuan yang masih di bawah garis kemiskinan termasuk kelompok PEKKA dan organisasi – organisasi perempuan yang ada di 27 kecamatan di Kabupaten Bone.
3. Total kebutuhan dana PAGU Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebesar Rp. 3.040.908.249 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan (DAK) Non Fisik Kabupaten Bone.

Sebagai gambaran tentang indikator kinerja, target kinerja, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka pendek pada tahun 2022,

termasuk rencana program kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2022 – DPPPA Kab. Bone

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (3)	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023) (4)	TARGET SASARAN TAHUN 2021 (5)	PROGRAM & KEGIATAN (6)
1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keterlibatan perempuan di DPRD 	17,77	17,77	<p>☒ Program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan
		<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Gender (IPG) 	92,07	91,98	
		<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 	62,69	62,57	

					<p>Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>☐ Program Perlindungan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota ● Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota ● Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
--	--	--	--	--	---

	2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio KDRT 	0,16 %	0,18 %	☒ Pprogram Peningkatan Kualitas Keluarga <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya • Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Pencegahan pidana perdagangan anak. • Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komperehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan kegiatan dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar 	100 %	100 %	
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar. 	100 %	100 %	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat capaian kabupaten layak anak 	900 %	900 %	

					<ul style="list-style-type: none"> ☑ Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak <ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota ● Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak ● Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota ● Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota ☑ Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) <ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak kepada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota. ● Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota ☐ Program Perlindungan Khusus Anak <ul style="list-style-type: none"> ● Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	--	--	---

2. Meningkatkan akuntabilitas urusan DPPPA	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Predikat Sakip oleh APIP 	92 %	92 %	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan. <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan • Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
<p>7 (Tujuh) Program beserta 20 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan didalamnya ini merupakan Program dan Kegiatan Pendukung yang tergabung dalam Sasaran ke-8 untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama lainnya dalam mencapai ke-2 tujuan dan 7 sasaran strategis DPPPA Kab. Bone sebagaimana tersebut di atas.</p>					<ul style="list-style-type: none"> ▣ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN • Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

					<ul style="list-style-type: none"> ● Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan ● Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ● Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ● Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor ● Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ● Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan ● Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ● Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ● Sub Kegiatan Pengadaan dan peralatan dan mesin lainnya ● Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ● Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik ● Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor ● Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none">• Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan• Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya• Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
--	--	--	--	--	---

BAB. IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam hal Tugas dan Fungsi yang tergambar dalam Rencana kerja dan pendanaan program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan periode pada tahun 2022 hanya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) / APBD Kabupaten Bone dan dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone
Tahun 2013-2021 dan Proyeksi Tahun 2022

TAHUN	PAGU ANGGARAN					Persentase terhadap Total Belanja APBD
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	BELANJA OPERASI	BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	BELANJA MODAL	TOTAL PAGU ANGGARAN	
2013	Rp. 311.757.300,-	-	Rp.833.986.000,-	-	Rp. 1.145.743.300,-	-
2014	Rp. 428.258.700,-	-	Rp.1.303.986.000,-	-	Rp. 1.732.244.700,-	-
2015	Rp. 487.777.700,-	-	Rp. 2.500.000.000,-	-	Rp. 2.987.777.700,-	-
2016	Rp. 543.835.300,-	-	Rp. 2.291.910.000,-	-	Rp. 2.835.745.300,-	-
2017	Rp. 958.531.300,-	-	Rp. 2.850.000.000,-	-	Rp. 3.808.531.300,-	-
2018	Rp. 1.287.079.119,-	-	Rp. 1.850.000.000,-	-	Rp. 3.137.079.119,-	-
2019	Rp. 1.772.253.449,-	-	Rp. 1,700.000.000,-	-	Rp. 3.472.253.449,-	-
2020	Rp. 2.960.578.000,-	-	Rp. 1.007.500.000,-	-	Rp. 3.968.780.000,-	-
2021	-	Rp. 3.032.908.249,-	-	Rp. 8.000.0000.	Rp. 3.040.908.249,-	0,11 %
2022	-	Rp. 2.426.741.809,-	-	-	Rp. 2.426.741.809,-	0,01 %

Catatan : Nilai anggaran tahun 2022 merupakan proyeksi anggaran terhadap RAPBD Tahun 2022 dengan asumsi peningkatan 10 % dari anggaran Tahun 2019

Nilai Pagu belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel diatas merupakan nilai Pagu indikatif berdasarkan hasil analisis kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, yang telah diproyeksikan sebesar 10 % dari estimasi anggaran yang telah direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai.

Dari tabel tersebut di atas, tergambar bahwa meski terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2013 hingga proyeksi tahun 2022. Namun demikian, peningkatan alokasi

anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga peningkatannya kedepan dilakukan secara proporsional dan signifikan disetiap tahunnya.

4.2. Program dan kegiatan serta pendanaan rencana perangkat daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2021

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan rancangan awal Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone. Periode tahun 2021 s/d 2023 serta hasil kajian terhadap isu- isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan sasaran strategis setiap tahunnya.

Bertujuan untuk mendorong arah pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja tahun 2022, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone juga direncanakan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait pencapaian **SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pengarusutamaan Gender** dan sekaligus membantu Bupati dan wakil Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone tahun 2022, direncanakan terdiri dari 8 program dan 18 kegiatan 34 Sub Kegiatan dimana difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone, seperti Tabel yang tersaji pada Bab III sebelumnya.

Ada 8 (Delapan) program prioritas diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone dalam bentuk pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi, peningkatan SDM sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai.

Sementara ke 1 (Satu) program lainnya merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019, maka ditetapkan pula indikator kinerja program dan kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing- masing program dan kegiatan yang direncanakan. Begitupun dengan pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone tahun 2020 dan proyeksi

tahun 2021. Dan sekaligus menentukan lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing- masing program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone.

Secara lengkap rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2021 dan prakiraan maju 2022, dapat dilihat tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 – DPPPA Kab. Bone

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Usuran Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar								
2 08	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kab. Bone	95,50 %		DAU-APBD		97,00 %	
2 08 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Predikat Evaluasi SAKIP Pada APIP	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 2.445.400.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 2.494.500.000
2 08 01 201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang tersusun selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 21.000.000	DAU-APBD	Untuk Meningkatkan Kinerja Evaluasi SAKIP	100 %	Rp. 21.000.000
2 08 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Kec. Tanete Riattang Barat	5 Dokumen (Renja, Renstra, RKA, DPA, DPPA)	Rp. 15.000.000	DAU-APBD	Untuk meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Anggaran	12 Bulan	Rp. 15.500.000
2 08 01 201 02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Dokumen (LKIP, Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan)	Rp. 6.000.000	DAU-APBD	Untuk meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja oleh APIP	12 Bulan	Rp. 6.000.000
2 08 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 1.716.400.000	DAU-APBD	Untuk Meningkatkan Kinerja Evaluasi SAKIP	100 %	Rp. 1.764.500.000
2 08 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Tanete Riattang Barat	17 ASN	Rp. 1.700.000.000	DAU-APBD	Untuk Pembayaran Gaji dan tunjangan Tambahan Pegawai untuk Peningkatan Kinerja Aparatur ASN	18 Paket	Rp. 1.750.000.000
2 08 01 201 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan	Rp. 16.400.000	DAU-APBD	Untuk memperlancar Penyusunan Pelaporan Keuangan, percepatan realisasi Laporan Keuangan	4 Laporan	Rp. 16.500.000
2 08 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 150.000.000	DAU-APBD	Untuk Meningkatkan Kinerja Evaluasi SAKIP	100 %	Rp. 150.000.000
2 08 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kec. Tanete Riattang Barat	6 Orang	Rp. 100.000.000	DAU-APBD	Untuk Pelaksanaan Latpim II, III, Peningkatan Kualitas SDM	6 Orang	Rp. 100.000.000
2 08 01 205 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	30 Orang	Rp. 50.000.000	DAU-APBD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas DP3A	30 Orang	Rp. 50.000.000
2 08 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %		DAU-APBD	Untuk Meningkatkan Kinerja Evaluasi SAKIP	100 %	Rp. 351.000.000

						Rp. 351.000.000							
2	08	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 paket	Rp. 25.000.000	DAU-APBD	Dibutuhkan sebagai persediaan kebutuhan Kelancaran Adminstrasi Perkantoran, ATK,Kertas, Tinta, Materai	4 paket	Rp. 25.500.000
2	08	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan Miniman Rapat dan Tamu	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 15.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya makan Minum Rapat, Makan Minum Tamu dan Makan Minum Pegawai	4 Paket	Rp. 15.000.000
2	08	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Paket	Rp. 13.600.000	DAU-APBD	Sebagai Pendukung Meningkatkan danMemprelancar Administrasi Perkantoran	2 Paket	Rp. 13.600.000
2	08	01	206	06	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 8.000.000	DAU-APBD	Sebagai Penyediaan Bahan Bacaan Buku,Surat Kabar dan Majalah dan Media Cetak Iklan	12 Paket	Rp. 8.000.000
2	08	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan Aparat dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	80 Paket Kegiatan	Rp. 290.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sesuai sesuai dengan tugas Pokok Aparatur kedinasaan DP3A	80 Paket kegiatan	Rp. 290.000.000
2	08	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 50.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sesuai ASN yang belum mengiuti pelatihan Teknis	100 %	Rp. 50.000.000
2	08	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 50.000.000	DAU-APBD	Program Pendukung Kelancaran Tugas Perkantoran	4 Paket	Rp. 50.000.000
2	08	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	M 100 %	Rp. 64.000.000	DAU-APBD	Untuk Meningkatkan Kinerja Evaluasi SAKIP	100 %	Rp. 64.000.000
2	08	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv)	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Rekening	Rp. 6.000.000	DAU-APBD	Penunjang kelacaran pelaksanaan tugas kegiatan perkantoran	1 Rekening	Rp. 6.000.000
2	08	01	208	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	10 Orang	Rp. 58.782.000	DAU-APBD	Program Pendukung	10 Orang	Rp. 58.782.000
2	08	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 88.000.000	DAU-APBD	Untuk Meningkatkan Kinerja Evaluasi SAKIP	100 %	Rp. 88.000.000
2	08	01	209	01	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	5 Unit	Rp. 54.000.000	DAU-APBD	Meningkatkan kinerja Serta Memperlancar Tugas dan Fungsi Kedianasan Dinas DP3A	5 Unit	Rp. 54.000.000
2	08	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kec. Tanete Riattang Barat	5 Unit	Rp. 14.000.0000	DAU-APBD	Meningkatkan kualitas Peralatan dan Mesin	5 Unit	Rp. 14.000.0000

											Lainnya yang mengalami kerusakan		
2	08	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Gedung	Rp. 20.000.000	DAU-APBD DAU-APBD	Meningkatkan Utilitas Bagunan Kantor	1 Gedung	Rp. 20.000.000
2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	90,50 %	Rp. 645.545.000	DAU-APBD	Program Utama	92,07 %	Rp. 829.169.000
2	08	02	201		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab. Bone yang dilaksanakan	Kecamatan, Desa dan Kelurahan	90,50 %	Rp. 115.451.000	DAU-APBD	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender Untuk Mencapai suatu keadilan dan Kesetaraan Gender Kabupaten Kota (%)	92,07 %	Rp. 126.196.000
2	08	02	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten,Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG yang dilaksanakan	Data Kabupaten , Kecamatan, Kelurahan dan Desa	30 orang	Rp. 36.096.000	DAU-APBD	Pelaksanaanya dibeberapa wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	30 orang	Rp. 39.706..000
2	08	02	201	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Data Kabupaten , Kecamatan, Kelurahan dan Desa	50 orang	Rp. 79.355.000	DAU-APBD	Pelaksanaanya dibeberapa wilayah Kecamatan, Desa dan Keluraha	50 orang	Rp. 87.290.000
2	08	02	202		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kecamatan, Desa dan Kelurahan	50 Orang	Rp. 62.118.000	DAU-APBD	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender Untuk Mencapai suatu keadilan dan Kesetaraan Gender Kabupaten Kota (%)	92,07 %	Rp. 63.118..000
2	08	02	202	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat , TP, PKK Organisasi Perempuan dan Kader	35 Orang	Rp. 62.118..000	DAU-APBD	Melakukan peningkatan kapasitas Perempuan terkait dalam Politik dalam pengambilan keputusan 2 Lokasi	35 Orang	Rp. 63.118.000
2	08	02	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan	Kecamatan, Desa , Kelurahan	50 orang	Rp. 467.885.000	DAU-APBD	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender Untuk Mencapai suatu keadilan dan Kesetaraan Gender Kabupaten Kota (%)	92,07 %	Rp. 639.055.000
2	08	02	203	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat peningkatan kapasitas	Kelompok Kader, Kelompok Perempuan dan Tokoh Perempuan.	10 Titik	Rp. 437.885.000	DAU-APBD	Melakukan Sosialisasi 10 Titik Kelurahan/Desa, Watang Palakka, Polewali, Lonrae, Waetuwo, Tibojong, Biru, Pappolo,	10 Titik	Rp. 606.055.000

2	08	04	201	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas	Kelompok Pemberdayaan Perempuan dan Pekka	120 Orang	Rp. 96.540.000	DAU-APBD	1 Lokasi Kegiatan	120 orang	Rp. 116.194.000
2	08	04	201	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat penguatan/pembinaan	Kader GSI, Camat, Desa/Lurah dan TP PKK	54 orang	Rp. 58.745.000	DAU-APBD	Tersebar Di beberapa wilayah	54 orang	Rp. 59.745.000
2	08	04	203		Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya yang dilaksanakan	Dibeberapa Lokasi Wilayah	50 Orang	Rp. 75.000.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan event yang ada	1 kegiatan	Rp. 75.500.000
2	08	04	203	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kegiatan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya antara Lembaga dan Organisasi	LSM, TP.PKK, Camat, Lurah/Kades, Organisasi Perempuan dan Dunia Usaha	50 Orang	Rp. 75.000.000	DAU-APBD	Urusan Wajib	50 rang	Rp. 75.500.000
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang tersedia (%)	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 70.000.000	DAU-APBD	Program Utama	90 %	Rp. 70.000.000
2	08	05	201		Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disajikan	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Paket	65.000.000	DAU-APBD	Pembuatan Profil Geder dan Anak	550 Buku	70.000.000
2	08	01	201	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak di yang disediakan	Kec. Tanete Riattang Barat	500 Buku	35.000.000	DAU-APBD	Pembuatan Profil Geder dan Anak	550 Buku	40.000.000
2	08	01	201	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data yang disajikan dan dimanfaatkan	Kec. Tanete Riattang Barat	70 Orang	30.000.000	DAU-APBD	Pembentukan Tim Data Gender Anak Kabupaten Bone	70 Orang	30.000.000
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kecamatan, desa dan kelurahan layak anak	Kec. Tanete Riattang Barat	92,07 %	155.000.000	DAU-APBD	Program Wajib	92,02 %	180.000.000.
2	08	06	201		Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Desa Dan Kelurahan	308 Orang	155.000.000	DAU-APBD	Program Wajib	92,02 %	180.000.000.
2	08	06	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Kepada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	Camat Kades/Lurah, TP. PKK, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Tenaga Medis, Imam dan Pengurus Masjid	200 Orang	85.000.000.	DAU-APBD	Pendampingan Pemenuhan Hak Anak berkebutuhan khusus	210 Orang	95.000.000.
2	08	06	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan	Anak yang Berprestasi (SISWA SMP dan SMA) Non Formal dan Disabilitas	108 Orang	70.000.000.	DAU-APBD	Peruntukan Siswa Berprestasi Non Formal dan disabilitas	134 Orang	85.000.000.
2	08	07	201		Program Khusus Perlindungan Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	180.000.000		Program Wajib	85,70 %	190.000.000
2	08	07	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	Beberapa kecamatan	80 Orang	60.000.000.	D D AU-APBD	Pencegahan Korban Kekerasan	80 Orang	70.000.000.
2	08	07	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	Media, LSM, Kepolisian, Sekolah, Medis, Tenaga	80 Orang	60.000.000.	D D AU-APBD	1 Lembaga Kabupaten, 27 Gugus Tugas	80 Orang	70.000.000.

						Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	Pendidik, Tokoh masyarakat						
2	08	07	202		Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi yang disediakan	Beberapa Wilayah Kecamatan	50 Orang	70.000.000.	DAU-APBD	Penyediaan Layanan Kelembagaan Khusus	1 Paket	70.000.000.
2	08	07	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan	Beberapa Wilayah Kecamatan	50 Orang	70.000.000.	DAU-APBD	Khusus disabilitas	1 Paket	70.000.000.
2	08	07	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat penguatan dan pengembangan	Kabupaten	50 Orang	50.000.000.	DAU-APBD	Melakukan Penguatan Kelembagaan	50 Orang	50.000.000.
2	08	07	203	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan	LP2i, LSM Permehati Anak, Media Massa	50 Orang	50.000.000.000	DAK-APBD	Melakukan Sikronisasi anatara Lembaga	50 Orang	50.000.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF									Rp. 3.931.230.000,-				Rp. 4.321.108.000

BAB.V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya tahun 2021 ini, terdapat peningkatan yang signifikan dalam program dan kegiatan dibandingkan dari tahun 2020. Di tahun 2021 penyusunan program dan kegiatan tetap memprioritaskan untuk meningkatkan Kualitas hidup Perempuan dan Anak termasuk kegiatan yang *propoor* (pengentasan kemiskinan).

Melalui Produktivitas Ekonomi Perempuan dan Anak, layanan terhadap Korban kekerasan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Akselerasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan yang meliputi sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kaidah – kaidah pelaksanaan rencana kerja ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkewajiban memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2021.
2. Para kepala Bidang dan Sekretaris lingkup DP3A melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan target- target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2021
3. Para kepala Sub bagian dan Kepala Seksi membantu secara teknis kepala bidang/ Sekretaris dalam pencapaian target kinerja dan setiap program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun2021.
4. Staf membantu kepala sub Bagian/ Kasi dalam melaksanakan program dan kegiatan masing- masing.

5.2 Penutup

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Anak tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasional dalam RKPD Kabupaten Bone tahun 2021.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan rutin dan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone tahun anggaran 2021, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, diharapkan akan lebih akuntabel dan terukur.

Watampone, 1 Juli 2020

Kepala Dinas,
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kab.Bone



Dra. Hj. ROSNAWATI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 1985122022